

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Lingkungan adalah masalah yang seharusnya sangat diperhatikan oleh masyarakat di seluruh dunia sejak awal. Namun, masalah lingkungan ini baru muncul setelah dirasakannya dampak pengerusakan lingkungan ini oleh masyarakat global. Dampak yang dimaksud adalah pemanasan global yang menyebabkan suhu bumi menjadi naik dan menyebabkan berbagai bentuk bencana dan perubahan iklim. Hal ini dikarenakan proses industri dan agrikultur modern yang banyak melepaskan emisi gas berbahaya seperti CO₂, CFC dan metana yang merupakan hasil dari penggunaan energi, transportasi, industri dan perkebunan yang dilakukan manusia bumi.

Masalah lingkungan baru dibicarakan setidaknya selama lima puluh tahun belakangan. Pada tahun 1970an telah muncul pemikiran mengenai lingkungan di lingkup komunitas internasional dalam banyak negara. Sehingga pada tahun yang sama muncul pergulatan antara lingkungan dengan pembangunan. Pembangunan dan lingkungan adalah dua masalah yang saling bertolak belakang. karena jika manusia ingin menyelamatkan lingkungan, pembangunan hanya akan sedikit terjadi. Sebaliknya, jika manusia menginginkan pembanguana besar-besaran, maka tidak dihindari lagi terjadinya pengerusakan lingkungan. Ironisnya, pada masa itu, hampir semua negara sedang berada dalam proses pembangunan besar-besaran, khususnya oleh negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan negara-negara berkembang berusaha mengikuti jejak standar hidup negara-negara maju. Akibatnya, masalah lingkungan tidak begitu diperhatikan lagi. Oleh karena itu banyak negara-negara berkembang termasuk Indonesia, menghadapi isu lingkungan ini dengan menggunakan program pembangunan berkelanjutan.

Perbincangan tentang “Pembangunan Berkelanjutan” atau “*sustainable development*” sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru baik lihat secara global maupun nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan dan mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi atau pelaksana.

Pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Konferensi Stockholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (*eco-development*). (Abdurrahman, 2003: 1)

Salah satu pengelolaan hutan yang diyakini dapat memberikan manfaat ekonomi, budaya dan sosial secara berkelanjutan adalah pengembangan ekowisata. Ekowisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara regional maupun lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga memelihara kelestarian sumber daya alam, dalam hal ini keanekaragaman hayati sebagai daya tarik wisata. Ekowisata dapat membawa dampak positif berupa peningkatan ekonomi, konservasi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. (Restu, Keadaan Hutan Indonesia)

Dilaksanakannya konferensi tersebut adalah sejalan dengan keinginan dari PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. Bertepatan dengan di umulkannya “Strategi Pembangunan Internasional” bagi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2” (*The Second UN Development Decade*) yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970, Sidang Umum PBB menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta Internasional guna menanggulangi “proses pemerosotan kualitas lingkungan hidup” agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia, secara khusus resolusi Sidang Umum PBB No.2657 (XXV). (Abdurrahman, 2003: 2)

Sekitar 70% daratan di Indonesia berupa kawasan hutan Negara. Pengelolaan hutan tersebut berada pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengelolaan hutan memberikan tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah), membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan menggiatkan sektor ekonomi. Namun pemanfaatan hutan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hutan. Dampak kerusakan hutan bagi perekonomian hanyalah bagian kecil dari total dampak yang sebenarnya. Dampak ekonomi tidak mencerminkan seluruh dampak yang terjadi. Fungsi hutan sebagai daya dukung lingkungan justru memberi peran lebih besar.

Indonesia terletak di bawah garis khatulistiwa dan garis *wallace*, ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang berlimpah. Menurut *World Bank*, Indonesia memiliki 17% spesies burung, 16% reptil dan amfibi, 12% mamalia, dan 10% tanaman di dunia. Oleh karena itu keanekaragaman hayati Indonesia menjadi salah satu dari keanekaragaman hayati dunia yang dikenal sebagai *mega-biodiversity country*. (menlh.go.id)

Indonesia menempati peringkat ke-14 negara-negara penghasil emisi karbon (gas rumah kaca/GRK) tertinggi di dunia berdasarkan sebuah laporan dari *United Nations Development Programme* (UNDP) di tahun 2008. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa di sektor kehutanan, emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi mencapai 80 persen, sedangkan 20 persen sisanya diakibatkan oleh degradasi hutan. Kajian Kementerian Lingkungan Hidup (2009) juga memprediksi bahwa tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia masih akan terus meningkat dari 1,72 Gton CO₂e pada tahun 2000 menjadi 2,95 Gton CO₂e pada tahun 2020. (Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2014)

Menghadapi sorotan dunia terhadap emisi GRK dari sektor kehutanan dan posisi geografis Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61/2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2010-2020. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas komitmen pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 di Pitsburg untuk menurunkan emisi GRK Indonesia sebesar 26-41 persen. Dalam rencana aksi tersebut disebutkan bahwa 88 persen dari total emisi GRK yang ingin diturunkan oleh pemerintah berasal dari sektor kehutanan. (Cuplikan Naskah Akademis Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020)

Perkiraan mengenai peningkatan emisi gas rumah kaca bisa dipahami bila merujuk pada kecenderungan deforestasi yang masih tinggi. Periode 1996-2000 laju deforestasi di Indonesia mencapai 2 juta hektare per tahun. Pada rentang 10 tahun berikutnya, laju deforestasi mencapai 1,5 juta hektare per tahun dan potret keadaan hutan periode 2009-2013 ini menemukan laju deforestasi sebesar 1,1 juta hektare per tahun (Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2014).

Laju deforestasi yang cenderung tinggi adalah dampak dari tata kelola kehutanan yang tak kunjung membaik. Empat penyebab tidak langsung dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia adalah:

- a) perencanaan tata ruang yang tidak efektif,
- b) masalah-masalah terkait dengan tenurial,
- c) pengelolaan hutan yang tidak efisien dan efektif
- d) penegakan hukum yang lemah serta maraknya korupsi di sektor kehutanan dan lahan. (*Forest Watch Indonesia, Potret Buruk Tata Kelola Hutan di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur*)

Salah satu keanekaragaman hayati Indonesia adalah hutan. Hutan Indonesia adalah hutan hujan tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo dan menjadi hutan tropis terluas di seluruh Asia. Menurut data statistik kehutanan RI pada tahun 2012, luas kawasan hutan mencapai 98.686,1 juta ha. Kawasan tersebut diklasifikasikan sebagai hutan primer, hutan sekunder dan hutan tanaman termasuk Area Penggunaan Lain (APL) dan difungsikan sebagai hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Hutan merupakan sumberdaya penting seperti bahan makanan, kayu bakar, bahan bangunan, pakan ternak, obat-obatan, dan banyak hal lainnya. Pohon dan hutan juga berperan penting bagi keberlanjutan lingkungan yang sehat. Mereka menjaga kebersihan udara dan air, mencegah erosi dan banjir, menyuburkan tanah, menyediakan tempat bersarang bagi burung-burung, hewan, dan tanaman, memberikan perlindungan, dan membuat lingkungan kita indah. Agar hutan dapat terus memberikan sumberdaya dan menjamin kelangsungan suatu lingkungan yang sehat, maka hutan harus dipelihara dengan baik, dikelola secara adil, dan digunakan dengan bijaksana. Namun mengingat hutan berharga bagi industri dan juga bagi warga, dan karena lahan hutan kadang-kadang diinginkan untuk kepentingan lain, maka pembabatan hutan di seluruh dunia terjadi lebih cepat dibanding kemampuan hutan untuk tumbuh kembali. (Tim MKU PLH, 2014: 8-9)

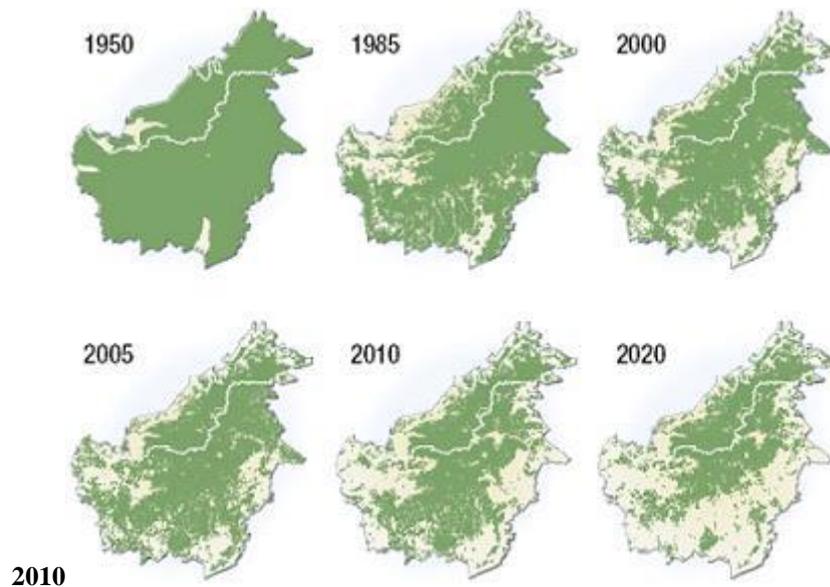
Salah satu wilayah sektor kehutanan Indonesia yang luas ialah Kalimantan, selain itu wilayah Kalimantan juga sebagai penyumbang terbesar dari deforestasi dan kerusakan hutan Indonesia yaitu sekitar 41% dari total deforestasi dan kerusakan hutan.

Menurut data statistik Kementerian Kehutanan dan Lingkungan RI pada tahun 2010 sampai 2012, kebakaran hutan yang paling luas ialah terjadi di wilayah Kalimantan. Selain itu, deforestasi hutan di Kalimantan mengancam kehidupan flora dan fauna di hutan terutama spesies yang terancam punah, seperti badak, orangutan, harimau, dan gajah. Pada tahun 2012, status badak Borneo Indonesia adalah “*poor*” kurang dari 25 ekor yang tersisa, dan status orangutan dan gajah Borneo “*fair*” sekitar 50% sampai 70% yang tersisa. Gambar 1.2 di bawah menunjukkan bahwa dari tahun 1950 hingga tahun 2010, tidak lebih dari 60% hutan Kalimantan yang tersisa. (wwf.panda.org)

Pulau Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya, yaitu sekitar 40,8 juta hektar. Sayangnya laju deforestasi di Kalimantan demikian cepatnya. Menurut data yang dikeluarkan Departemen Kehutanan, angka deforestasi di Kalimantan pada 2000 sampai dengan 2005 mencapai sekitar 1,23 juta hektare. Artinya sekitar 673 hektare hutan di Kalimantan mengalami deforestasi setiap harinya pada periode tersebut. Luas hutan di seluruh provinsi yang ada di Kalimantan mencapai sekitar 40,8 juta hektare. Sementara itu menurut *Greenpeace*, hutan di Kalimantan hanya tersisa 25,5 juta di tahun 2010. (profauna.net)

Deforestasi di Indonesia disebabkan oleh industri kayu yang semakin mempersempit hutan alami. Pengalihan fungsi (konversi) hutan untuk perkebunan kelapa sawit juga memberikan kontribusi besar terhadap semakin derasnya laju deforestasi. Konversi hutan menjadi area perkebunan sawit telah merusak lebih dari 7 juta hektar hutan sampai pada tahun 1997. Berkurangnya luasan dan kualitas hutan di Kalimantan menjadi ancaman serius bagi berbagai jenis satwa langka di Kalimantan, antara lain orangutan, bekantan, beruang madu dan berbagai jenis owa. Satwa langka itu kondisinya terjepit diantara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan perburuan liar. (profauna.net)

Gambar 1. Penyusutan Hutan Kalimantan tahun 1950-



Sumber: World Wide Fund for Nature (WWF) tersedia di wwf.or.id

Di sisi lain, menurut Stephan Wulffraat, *Heart of Borneo Monitoring and Evaluation Program* – WWF Indonesia, mengatakan bahwa penyebab deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan tidak jauh berbeda di provinsi lain di Indonesia. Selain konversi lahan ke area lain, ada banyak faktor penyebab dari deforestasi, seperti pembalakan liar (*illegal logging*), penambangan liar, kebakaran hutan, dan pemanfaatan tanaman dan satwa liar (TSL) secara liar.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dari banyaknya kasus deforestasi yang dilakukan tersebut, hal ini dapat menyebabkan Indonesia menjadi negara penyumbang emisi di dunia berdasarkan penggunaan di sektor lahan hutan, lahan pertanian dan padang rumput, serta emisi non-CO₂ dari kebakaran biomassa dan tanah organik. Menurut FAO, pada tahun 2009, Indonesia menyumbang sekitar 57% dari total emisi dunia dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 58% dari total emisi dunia.

Dalam satu dekade terakhir setidaknya 1,2 juta hektar hutan di Indonesia hilang setiap tahun. Demikian juga hal ini terjadi di kawasan hutan Borneo. Hal ini disebabkan oleh kegiatan penebangan hutan secara besar-besaran dan pengalihan fungsi kawasan hutan. Saat ini hutan Borneo yang tersisa tidak lebih dari 60%, dan apabila praktik-praktik pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab ini terus berlangsung maka keberadaan hutan akan terus berkurang. Akibatnya akan menurunkan fungsi hutan,

hilangnya keanekaragaman hayati dan timbulnya bencana alam. Pengelolaan kawasan *Heart of Borneo* (HoB) secara bijak akan membantu memberi kepastian berkelanjutannya manfaat hutan di kawasan HoB bagi generasi sekarang dan mendatang. (wwf.or.id)

Deklarasi *Heart of Borneo* telah dibuat oleh pemerintah tiga negara HoB pada tahun 2007. Lima tahun kemudian, artikulasi terhadap visi konservasi dan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam deklarasi tersebut semakin menguat. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah Konferensi International yang diselenggarakan oleh Departemen Kehutanan Sabah, yang bertajuk *The Heart of Borneo +5 and Beyond - Shaping and nurturing Sabah's future together*, bertempat di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Selain diikuti oleh lebih dari 500 peserta, apa yang membuat konferensi ini menjadi istimewa, adalah besarnya dukungan pemerintah daerah dan nasional terhadap Inisiatif *Heart of Borneo* dan perannya dalam pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat, bumi dan profit (*3P People, Planet and Profit*). (wwf.or.id)

Ini merupakan agenda pertemuan trilateral yang membahas program *Heart of Borneo* :

1. Brunei Darussalam, April 2005 ini adalah pertama kalinya bahwa tiga pemerintah Borneo duduk untuk membahas masa depan HoB. Agenda diatur untuk melanjutkan diskusi mengenai isu dan konsensus dicapai pada Visi dan Rencana Aksi untuk mempromosikan Deklarasi *Heart of Borneo*.
2. KTT Pimpinan ASEAN, Malaysia, Desember 2005. Hal ini memberikan persetujuan resmi ASEAN untuk mengembangkan inisiatif HoB
3. COP8/CBD Brasil, Maret 2006. HoB secara resmi diluncurkan pada konferensi Kesepakatan Keanekaragaman Hayati oleh Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Ketiga negara menegaskan komitmen mereka untuk mendukung inisiatif.
4. Deklarasi *Heart of Borneo*, Indonesia, Februari 2007. Deklarasi untuk melestarikan "*Heart of Borneo*" secara resmi ditandatangani antara tiga pemerintah Kalimantan-Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia.
5. Pertemuan Tiga Negara Pertama, Brunei Darussalam, Juli 2007. Mufakat dicapai pada beberapa isu. Ini termasuk pentingnya pengembangan Dokumen Proyek Nasional untuk mencapai visi HoB dan proposal pengembangan sekretariat.

6. Pertemuan Tiga Negara Kedua, Indonesia, April 2008. Tiga negara sepakat pada lima program utama: Pengelolaan Lintas Batas, Pengelolaan Kawasan Lindung, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Pengembangan Ekowisata, dan Pengembangan Kapasitas, serta 21 poin tindakan yang akan dilaksanakan di tiga negara. Jadi penelitian penulis ingin lebih fokus pada Sumber Daya Alam Berkelanjutan.
7. Pertemuan Tiga Negara Keempat, Brunei Darussalam, April 2010. Dalam pertemuan ini menekankan akan perlunya menyelesaikan beberapa isu yang beredar dalam rangka memfasilitasi dan meningkatkan kinerja Pertemuan Tiga Negara *Heart of Borneo*. Selain itu, pertemuan ini menyebutkan kemungkinan dukungan Pengelolaan Kelembagaan dan Modalitas, memutuskan logo HoB yang diusulkan, studi potensi pembiayaan berkelanjutan, dan untuk menyelaraskan hal-hal yang terkait dengan Sistem Informasi Geografis untuk HoB.
8. Pertemuan Tingkat Menteri, Brunei Darussalam, September 2013. Dalam rangkaian kegiatan Trilateral Meeting ke-7, diadakan juga pertemuan tingkat menteri sebagai suatu bentuk pembaharuan komitmen terhadap inisiatif HoB. Pada pertemuan tersebut disahkan "*Joint Ministerial Statement on The HoB Initiative*" yang sebelumnya dibahas dalam pertemuan Trilateral ke-7. Kemudian juga disepakati *Joint Press Statement* yang diluncurkan pada saat jumpa pers di acara tersebut. (heartofborneo.or.id)

Nama Borneo mengacu pada keseluruhan pulau yang telah dikenal secara internasional. Sedangkan nama Kalimantan adalah wilayah Borneo di bagian Indonesia. Hal ini juga untuk menunjukkan bahwa tiga negara di Borneo yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam memiliki kesepakatan bersama dalam inisiatif HoB. Di Indonesia program ini dikenal sebagai Program Jantung Kalimantan.

Kawasan HoB memiliki 7 fungsi penting yaitu tutupan kawasan hutan, melimpahnya keanekaragaman hayati, menara air, kelerengan kawasan, penyimpan karbon, sosial-budaya dan ekowisata. Salah satu fungsi penting kawasan HoB adalah sebagai menara air, dimana 14 dari 20 sungai utama di Pulau Borneo berhulu di kawasan HoB, seperti Sungai Barito, Sungai Mahakam, Sungai Kapuas dan lainnya.

Heart of Borneo (HoB) merupakan inisiatif pemerintah sehingga program dan kegiatan HoB diprakarsai oleh pemerintah bekerja sama dengan para mitra. Dalam

pelaksanaannya semua kegiatan HoB dikoordinasikan oleh pemerintah melalui Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) di tingkat nasional, Kelompok Kerja Provinsi (Pokjapro) di tingkat provinsi dan Kelompok Kerja Kabupaten (Pokjakab) di tingkat kabupaten. Pokjanas HoB bekerja untuk memfasilitasi isu-isu yang terjadi di tingkat nasional, demikian juga dengan Pokjapro dan Pokjakab masing-masing untuk isu-isu di tingkat provinsi dan kabupaten. Anggota Pokjanas adalah kementerian terkait dan perwakilan Pokjapro yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan. Demikian juga untuk Pokjapro dan Pokjakab beranggotakan dinas dan instansi terkait yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati. (heartofborneo.or.id)

Para mitra HoB adalah lembaga terkait, organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat atau sosial, dan organisasi lainnya. Para mitra ini memiliki peranan yang penting dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan HoB. Mitra bisa bekerja sama dengan pemerintah, secara individu, atau bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah lainnya.

Organisasi non pemerintah dibentuk berdasarkan tujuan dan isu yang menjadi fokus mereka. WWF melihat bahwa isu lingkungan yang melibatkan kerjasama lintas batas di HoB. Bukan hanya kewajiban suatu negara melainkan semua pihak terlibat di dalamnya, terlebih setelah WWF terlibat langsung dalam kelompok kerja pemerintahan Indonesia.

Di awal November 2012, Dewan *Global Environment Facility* (GEF) menyetujui 9 juta US\$ atau sekitar 86 milyar rupiah untuk Program Hutan Berkelanjutan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Borneo. Program ini dirancang untuk memastikan pengelolaan sumberdaya hutan dan keanekaragaman hayati secara lestari di *Heart of Borneo* (HoB) wilayah Indonesia dengan memperkuat kapasitas pemerintah Indonesia dalam mengembangkan peluang penghidupan masyarakat lokal secara berkelanjutan dan skema pendanaan yang berkelanjutan. WWF mulai mendukung program ini sejak 2009 bersama pemerintah HoB dan sejak itu WWF bekerja bersama *Asian Development Bank* (ADB), sebagai *leading agency* untuk implementasi GEF. (wwf.or.id)

Gambar 2. Forest Cover in Borneo : Past and Future.



Sumber : WWF

Dana Lingkungan Hidup, *World Wide Fund*, memprediksi Kalimantan akan kehilangan 65% luas wilayah hutannya pada 2020 menyusul tingginya laju deforestasi. Hal itu diungkapkan dalam laporan tahunan mengenai situasi lingkungan di Kalimantan yang dipublikasikan WWF Indonesia dan Malaysia. (dw.com)

Dari sekitar 74 juta hektar hutan yang dimiliki Kalimantan, hanya 71% yang tersisa pada 2005. Sementara jumlahnya pada 2015 menyusut menjadi 55%. Jika laju penebangan hutan tidak berubah, Kalimantan diyakini akan kehilangan 6 juta hektar hutan hingga 2020, artinya hanya kurang dari sepertiga luas hutan yang tersisa.

Hutan basah Kalimantan yang menjadi habitat alami bagi berbagai jenis satwa adalah yang paling terancam oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, penambangan dan pertanian. Menurut WWF, Kalimantan akan kehilangan 10-13 juta hektar hutan antara 2015 hingga 2020.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil rumusan masalah **“Bagaimana kerjasama Indonesia dengan WWF dalam mendorong sumber daya alam berkelanjutan pada program**

Heart of Borneo periode 2012-2016?” Penulis mengambil periode ini karena pada tahun 2012 merupakan tahun pertama bagi WWF mengemban tugas sebagai pelaksana HoB Pemerintah Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 382/Menhut-II/2011 tentang Kelompok Kerja Nasional Program HoB. Selain itu WWF juga sebagai satu-satunya aktor non-negara di Indonesia yang terlibat dalam struktur organisasi tersebut.

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui implementasi program *Heart of Borneo* dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
- b. Mengetahui bagaimana peningkatan konservasi hutan Kalimantan melalui kerjasama Indonesia dengan WWF pada program *Heart of Borneo*

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan informasi ataupun data dalam perkembangan studi HI yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi mengenai implemmentasi WWF pada program *Heart of Borneo*.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang membahas literature review dimana peneliti membedakan penelitian yang ditulis peneliti dengan penelitian terdahulu, kemudian membahas kerangka pemikiran dimana peneliti menentukan konsep dan teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis penelitian ini, serta membahas asumsi dan alur pemikiran dimana peneliti mempunyai sebuah pandangan mengenai penelitian ini dan arah berfikir peneliti dalam menganalisis penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi waktu penelitian. Bab ini menekankan bagaimana peneliti menggunakan metode-metode untuk menganalisis penelitian ini.

BAB IV BENTUK KERJASAMA INDONESIA DENGAN WWF PADA PROGRAM HoB

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai bagaimana kerjasama Indonesia dengan WWF dalam mendorong sumber daya berkelanjutan pada program *Heart of Borneo* (HoB) periode 2012-2015. Pada sub-bab pertama tentang pengertian HoB. Sub-bab kedua Sejarah Trilateral HoB. Sub-bab kerjasama trilateral HoB

BAB V IMPLEMENTASI SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN PADA PROGRAM HEART OF BORNEO PERIODE 2012-2015

Pada bab ini merupakan bab yang membahas mengenai implementasi kerjasama Indonesia dengan WWF dalam mendorong sumber daya alam berkelanjutan pada program *Heart of Borneo* (HoB) periode 2012-2015. Pada sub bab pertama tentang Kerjasama Indonesia dengan WWF dalam program HoB. Sub bab kedua tentang Kerjasama Trilateral HoB. Pada sub bab ketiga tentang Kerjasama Trilateral dalam memberantas *illegal logging*. Pada sub bab keempat tentang Implementasi program HoB yang telah dijadikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) oleh pemerintah.

BAB VI KESIMPULAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian, dan saran guna masukkan terkait akan permasalahan lingkungan yang diangkat oleh penulis.